

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
TAHUN 2015

5.1 Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial

Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Arah Kebijakan spasial Pemerintah Daerah Provinsi antara lain mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2019.

Fokus pembangunan Jawa Timur pada tahun 2014-2019 diarahkan pada pemantapan perkotaan Pusat Kegiatan Nasional sebagai metropolitan di Jawa Timur, pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan serta memantapkan pengembangan kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya.

5.2 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah

Secara umum kebijakan pembangunan kewilayahan di Provinsi Jawa Timur adalah :

1. Pemerataan pembangunan antar wilayah dengan memperkecil dikotomi antara kawasan perdesaan dan kawasan perkotaan melalui keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan serta keseimbangan pengembangan wilayah utara-selatan Jawa Timur dan Pulau Madura dengan tetap didasarkan pada potensi sumberdaya yang dimiliki.
2. Peningkatan pembangunan kewilayahan melalui pembangunan infrastruktur yang saling terkait sehingga meningkatkan daya saing daerah terutama pada wilayah yang relative tertinggal dalam rangka memacu pertumbuhan wilayah dan menyeimbangkan pengembangan ekonomi wilayah.
3. Peningkatan ketahanan pangan dan ketahanan energy pada wilayah-wilayah terpencil dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.

4. Peningkatan fungsi kawasan lindung, kelestarian sumberdaya alam dan optimasi fungsi kawasan budidaya sebagai upaya perlindungan lingkungan sumberdaya alam/buatan dan ekosistemnya dalam rangka pembangunan berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan konservasi ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi fungsi perlindungan dan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut.
6. Pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran, mempercepat perkembangan wilayah dan kemajuan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan antar kawasan.
7. Peningkatan kerjasama antar daerah dalam pengembangan wilayah, agar terjadi keselarasan didalam pembangunan kawasan perbatasan antar provinsi dan antar kabupaten/kota sesuai dengan potensi daerah.

Cluster kewilayahan ditetapkan menjadi dasar sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur. Penetapan cluster dirumuskan berdasarkan arah pembangunan kewilayahan Jawa Timur yaitu sebagai Pusat Agrobisnis terkemuka yang disinkronisasikan dengan agenda pembangunan Tahun 2014-2019 yang difokuskan pada pengembangan kawasan strategis, utamanya kawasan strategis agropolitan, kawasan agroindustri, kawasan metropolitan dan kawasan tertinggal.

Adapun pembagian cluster kewilayahan dan arahan masing-masing strategi kewilayahan dalam rangka penekanan terhadap kondisi kesenjangan wilayah yang terjadi di Jawa Timur sebagai berikut:

1. Cluster Agropolitan Madura

Pulau Madura dalam arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi, yaitu Kawasan Agropolitan Madura, dan Kawasan Tertinggal (Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Bangkalan), sehingga Cluster Agropolitan Madura ditetapkan pada Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep.

2. Cluster Agropolitan Ijen

Dalam arahan pengembangan kewilayahan Kawasan Ijen ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan

Ekonomi, yaitu Kawasan Agropolitan Ijen, dan Kawasan Tertinggal (terdiri dari Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Bondowoso), sehingga Cluster Agropolitan Ijen ditetapkan pada Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi.

3. Cluster Agropolitan Bromo Tengger Semeru

Dalam arahan pengembangan kewilayahan cluster agropolitan Bromo Tengger Semeru ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi dan Kepentingan Sosial Budaya, yaitu Kawasan Agropolitan Bromo-Tengger-Semeru yang terdiri dari Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo dan Kabupaten Lumajang.

4. Cluster Agropolitan Wilis

Cluster Agropolitan Wilis dalam arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Ekonomi berupa Kawasan Agropolitan Wilis dan Kawasan Strategis Perbatasan Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, sehingga cluster Agropolitan Wilis ditetapkan pada Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan.

5. Cluster Metropolitan

Dalam arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan sebagai Rencana sistem perkotaan yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang memiliki fungsi pelayanan dalam lingkup nasional atau beberapa provinsi meliputi Kawasan Perkotaan Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan (Gerbangkertosusila) dan Kota Malang. Selain itu juga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Provinsi Sudut kepentingan Ekonomi berupa Kawasan Metropolitan yang berfokus pada pemantapan sektor industri, perdagangan, dan jasa komersial yang terdiri dari koridor Metropolitan.

Berdasarkan arahan sistem perkotaan dan penetapan kawasan strategis metropolitan, maka Cluster Metropolitan ditetapkan pada Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto.

6. Cluster Segitiga Emas

Cluster Segitiga Emas berdasarkan arahan pengembangan kewilayahan ditetapkan beberapa kawasan, meliputi Kawasan Agro Industri yang ditetapkan pada : Kabupaten Gresik (Bagian Utara) dan Kabupaten Lamongan (Bagian Utara). Dan pada Kawasan Perbatasan antar Kabupaten/Kota sebagai kawasan Segitiga Emas Pertumbuhan sebagai kawasan perbatasan antar-

kabupaten/kota yang ditetapkan pada Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Bojonegoro.

Berdasarkan arahan Kawasan Agroindustri Gresik – Lamongan dan kawasan perbatasan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah sisi utara, maka Cluster Segitiga Emas ditetapkan pada Kabupaten Tuban-Lamongan-Bojonegoro sebagai wilayah inti pengembangan Cluster Segitiga Emas dan Kabupaten Gresik sebagai pendukung pengembangan Cluster Segitiga Emas

7. Cluster Regional Kelud

Cluster Regional Kelud berfungsi sebagai pemerataan aktifitas pusat pertumbuhan perekonomian di Jawa Timur yang terdiri dari Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Kediri dan Kabupaten/Kota yang termasuk dalam Wilayah Pengembangan Blitar.

Berdasarkan arahan wilayah pengembangan, maka Cluster Regional Kelud ditetapkan pada Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar

8. Cluster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Cluster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil berfungsi sebagai pemerataan dan sebagai upaya untuk membuka akses pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang masih belum terlayani di Provinsi Jawa Timur. Cluster Pesisir dan Pulau-pulau Kecil diarahkan pada wilayah yang berada pada pesisir Jawa Timur dan wilayah kepulauan

5.3 Prioritas Pembangunan Spasial Tahun 2015

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Timur pada tahapan pertama tahun 2015-2019 ditujukan untuk mencapai target :

1. Prioritas dan arah kebijakan spasial pada rencana struktur ruang Provinsi Jawa Timur
 - a. Perwujudan struktur ruang pada system pusat pelayanan-sistem perkotaan melalui perencanaan tata ruang dan zonasi kawasan perkotaan pada Pusat Kegiatan Nasional dan Pusat Kegiatan Wilayah.
 - b. Perwujudan sistem jaringan prasarana utama pada sistem jaringan transportasi darat melalui:
 - 1) Peningkatan Jalan Provinsi dari kondisi rusak ringan dan rusak berat menjadi kondisi mantap, Penanganan seluruh Jalan Provinsi kondisi mantap dengan pemeliharaan rutin, Debottlenecking dan Standarisasi pelebaran Jalan Provinsi;

- 2) Pemantapan dan percepatan penyelesaian pengembangan jaringan jalan bebas hambatan baik antar kota maupun dalam kota dan jaringan jalan strategis provinsi.
 - 3) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana Terminal tipe A.
 - 4) Peningkatan fasilitas sarana prasarana lalu lintas jalan.
 - 5) Peningkatan, Pembangunan dan Relokasi Jembatan Timbang.
 - 6) Peningkatan dan Pembangunan pelabuhan penyeberangan.
 - 7) Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana perkeretaapian.
- c. Perwujudan sistem jaringan prasarana utama pada sistem jaringan transportasi laut melalui:
- 1) Pengembangan pelabuhan laut Tanjung Tembaga di Probolinggo, Tanjung Wangi di Banyuwangi, Boom di Banyuwangi, Brondong di Lamongan.
 - 2) Pengembangan pelabuhan utama Tanjung Perak yang terintegrasi dengan pengembangan pelabuhan di sekitarnya.
 - 3) Pengembangan pelabuhan pengumpul dan pengembangan pelabuhan pengumpan Brondong di Lamongan sebagai pendukung pelabuhan utama Tanjung Perak di Jawa Timur.
- d. Perwujudan sistem jaringan prasarana utama pada sistem jaringan transportasi udara melalui:
- 1) Pengembangan dan peningkatan kapasitas Bandar udara Juanda di Sidoarjo dan Abd Saleh di Malang.
 - 2) Pembangunan Bandar Udara Banyuwangi dalam rangka peningkatan operasional Bandar Udara.
- e. Perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya pada sistem jaringan energi melalui:
- 1) Pengembangan energi baru dan terbarukan berupa energi air untuk pembangkit listrik mikrohidro, energi angin, energi surya, energi air untuk PLTA, energi panas bumi, energi biogas, dan energi biomassa.
 - 2) Pengembangan pembangkit untuk peningkatan kapasitas tenaga listrik di Jawa Bali (termasuk Pulau Madura).

- 3) Pengembangan dan pengelolaan energi migas di Jawa Timur.
- f. Perwujudan system jaringan prasarana lainnya pada sistem jaringan Telekomunikasi dan Informatika melalui:
 - 1) Pengembangan jaringan terrestrial yang menggunakan sistem kabel.
 - 2) Pengembangan jaringan satelit yang menggunakan tower maupun non tower untuk memberikan akses kepada wilayah terpencil dan terisolir di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
- g. Perwujudan system jaringan prasarana lainnya pada system jaringan Sumber Daya Air
 - 1) Pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai di Provinsi Jawa Timur.
 - 2) Pengembangan system irigasi teknis untuk mendukung pertanian di Jawa Timur.
 - 3) Optimalisasi/pengembangan jaringan air baku untuk air minum melalui pengembangan SPAM Regional yaitu SPAM Regional Pantura, Lintas Tengah, Malang Raya, Umbulan.
 - 4) Optimalisasi pengembangan jaringan pengendali banjir berupa pengaturan sungai dan system pompa banjir, pintu darurat banjir *floodway*, perkuatan tanggul, dan pengaturan sungai dan system pengendali banjir.
- h. Perwujudan system jaringan prasarana lainnya pada system prasarana lingkungan
 - 1) Pengembangan TPA regional untuk melayani kota dan kabupaten dalam satu wilayah administrasi yakni pada wilayah pengembangan Malang Raya.
2. Prioritas dan arah kebijakan spasial pada rencana pola ruang Provinsi Jawa Timur
 - a. Perwujudan rencana pola ruang pada kawasan lindung.
 - 1) Pengendalian kegiatan budidaya dikawasan pantai.
 - 2) Penetapan delineasi kawasan perlindungan sekitar mata air.
 - 3) Pemantapan fungsi kawasan lindung dan rehabilitasi kawasan suaka alam, cagar alam, dan cagar budaya.
 - 4) Rehabilitasi ekosistem dan habitat yang rusak di kawasan hutan bakau/mangrove, pesisir (terumbu karang,

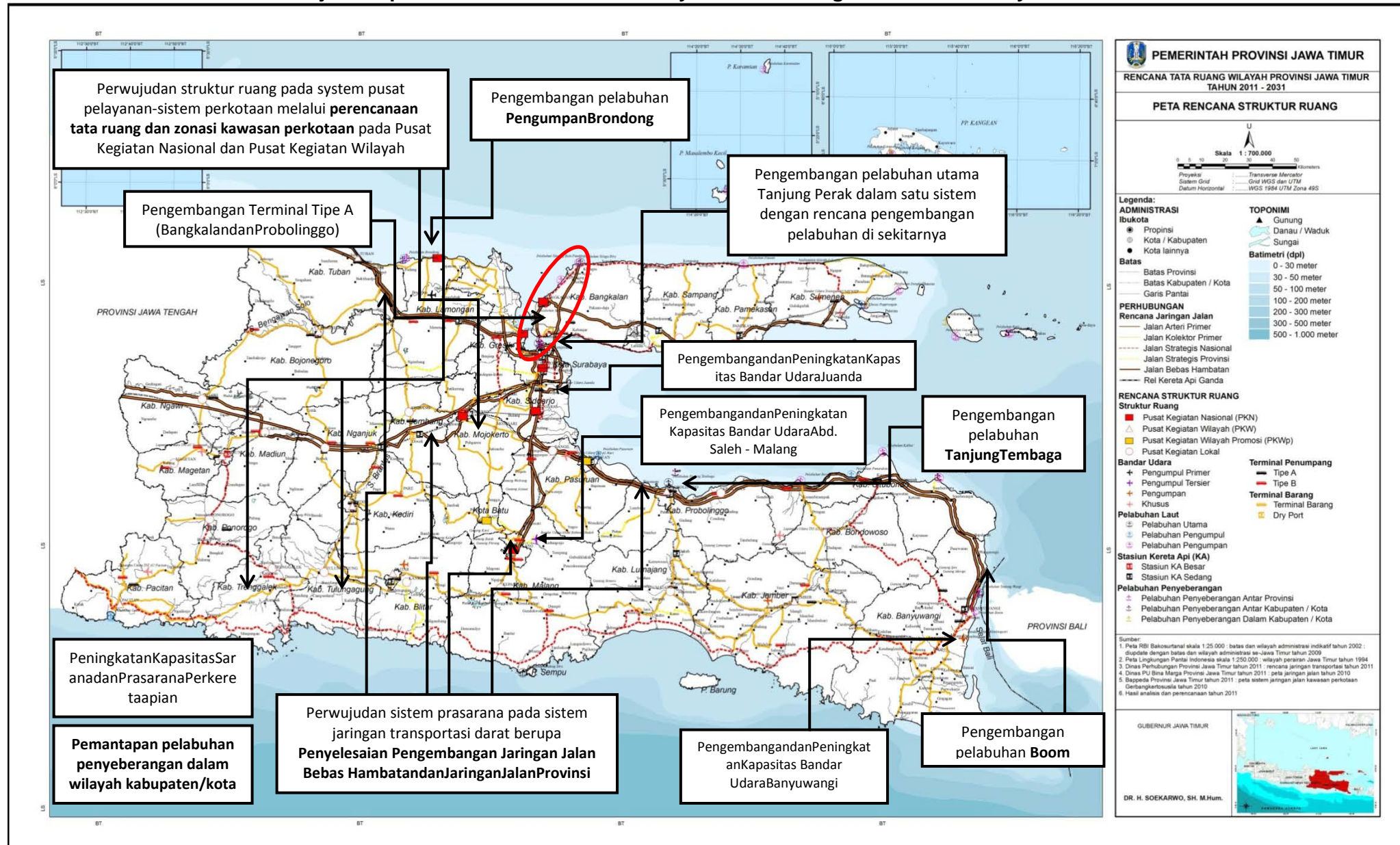
mangrove, padang lamun, dan estuaria), perairan, bekas kawasan pertambangan.

- 5) Pemantapan dan Penanggulan bencana longsor dan pemantapan strategi mitigasi bencana.
- 6) Perencanaan kawasan hulu supaya jernih dan mengurangi sedimentasi akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- b. Perwujudan rencana pola ruang pada kawasan budidaya.
 - 1) Pengembangan hutan tanaman industri, terutama pada kawasan hutan non-produktif, termasuk kemudahan perijinan usaha dan permodalan/pinjaman.
 - 2) Perencanaan pemanfaatan hutan rakyat dan penetapan peraturan pemanfaatan hutan rakyat.
 - 3) Pengembangan kawasan Pertanian Pedesaan, Pertanian lahan kering pada daerah yang belum terlayani jaringan irigasi, dan pengembangan kawasan pertanian hortikultura
 - 4) Pengembangan kawasan perkebunan pendukung kawasan strategis agropolitan.
 - 5) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan dilakukan dengan cara mengembangkan perikanan tangkap, sentra perikanan, dan minapolitan.
 - 6) Pengembangan kawasan peruntukan pertambangan berdasarkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dengan prinsip kelestarian lingkungan serta Penetapan wilayah prioritas rehabilitasi pertambangan.
 - 7) Pengembangan Kawasan peruntukan industri dengan cara mendelineasi dan menetapkan kawasan industri, kawasan peruntukan industri di luar kawasan industri dan pengembangan sentra.
 - 8) Perintisan pengembangan jejaring destinasi pariwisata unggulan (lead destination) dalam bentuk koridor pariwisata.
 - 9) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman melalui pembangunan rumah susun pada kawasan perkotaan
3. Prioritas dan arah kebijakan spasial pada rencana kawasan strategis Provinsi Jawa Timur
 - a. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi.

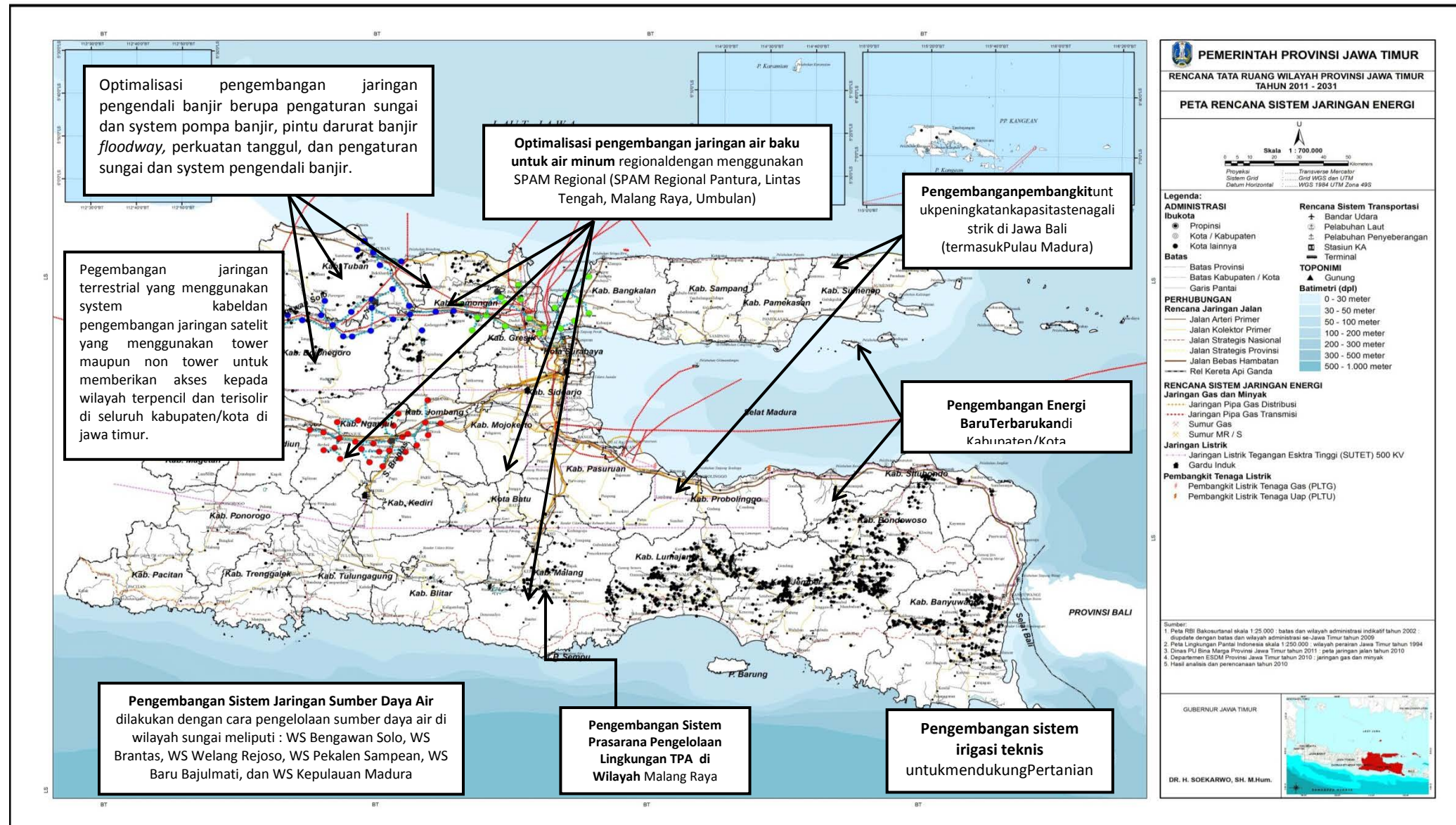
- 1) Perencanaan dan Pengembangan zonasi di Kawasan Ekonomi Unggulan (KEU) berupa zona pengembangan pelabuhan utama, zona pengembangan logistik dan perdagangan, zona industri pengolahan.
 - i. Pelabuhan Tanjung Bulupandan dan sekitarnya di Kabupaten Bangkalan.
 - ii. Pelabuhan Sendang Biru dan sekitarnya di Kabupaten Malang.
 - iii. Pelabuhan Teluk Lamong dan sekitarnya di Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik.
- 2) Perencanaan dan pengembangan zonasi di kawasan koridor metropolitan, berupa zona pusat pertumbuhan, zona penyangga, dan zona wilayah pelayanan.
- 3) pengembangan dan penguatan sinergitas kerjasama regional kawasan perbatasan antarkabupaten/kota, peningkatan akselerasi, koordinasi, dan sinkronisasi program di wilayah yang berbatasan, pengembangan dan peningkatan penelusuran aspek-aspek yang dapat dikerjasamakan yaitu pada kawasan Karismapawirogo, Golekpawon, Pawonsari.
- 4) Fasilitasi perintisan pengembangan potensi-potensi sumber daya, lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kawasan tertinggal (desa-desa tertinggal yang tersebar di Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Situbondo).
- b. Perwujudan Kawasan strategis dari sudut kepentingan social dan budaya
Penataan kawasan dengan optimasi nilai pengalaman budaya dan penonjolan nilai sejarah, pelestarian dan aktualisasi aset dan adat budaya daerah pada kawasan Mojopahit Park
- c. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan SDA dan/atau teknologi tinggi
 - 1) Pengembangan dan optimasi energi panas bumi.
 - 2) Pengembangan dan pengendalian kawasan pembangkit PLTG, PLTU, dan PLTD.

- 3) Pengembangan dan pengendalian kawasan pertambangan minyak dan gas bumi.
 - 4) Pengembangan program kegiatan ekonomi penunjang atau turunan dari kegiatan ekonomi utama di kawasan SDA/teknologi tinggi.
- d. Perwujudan kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan.
 - e. Pengembangan daya dukung dan daya tampung lingkungan di kawasan perlindungan ekosistem dan lingkungan hidup. Perlindungan sumber daya alam dari pemanfaatan yang eksploitatif dan tidak terkendali yaitu pada kawasan DAS Brantas dan Das Bengawan Solo.

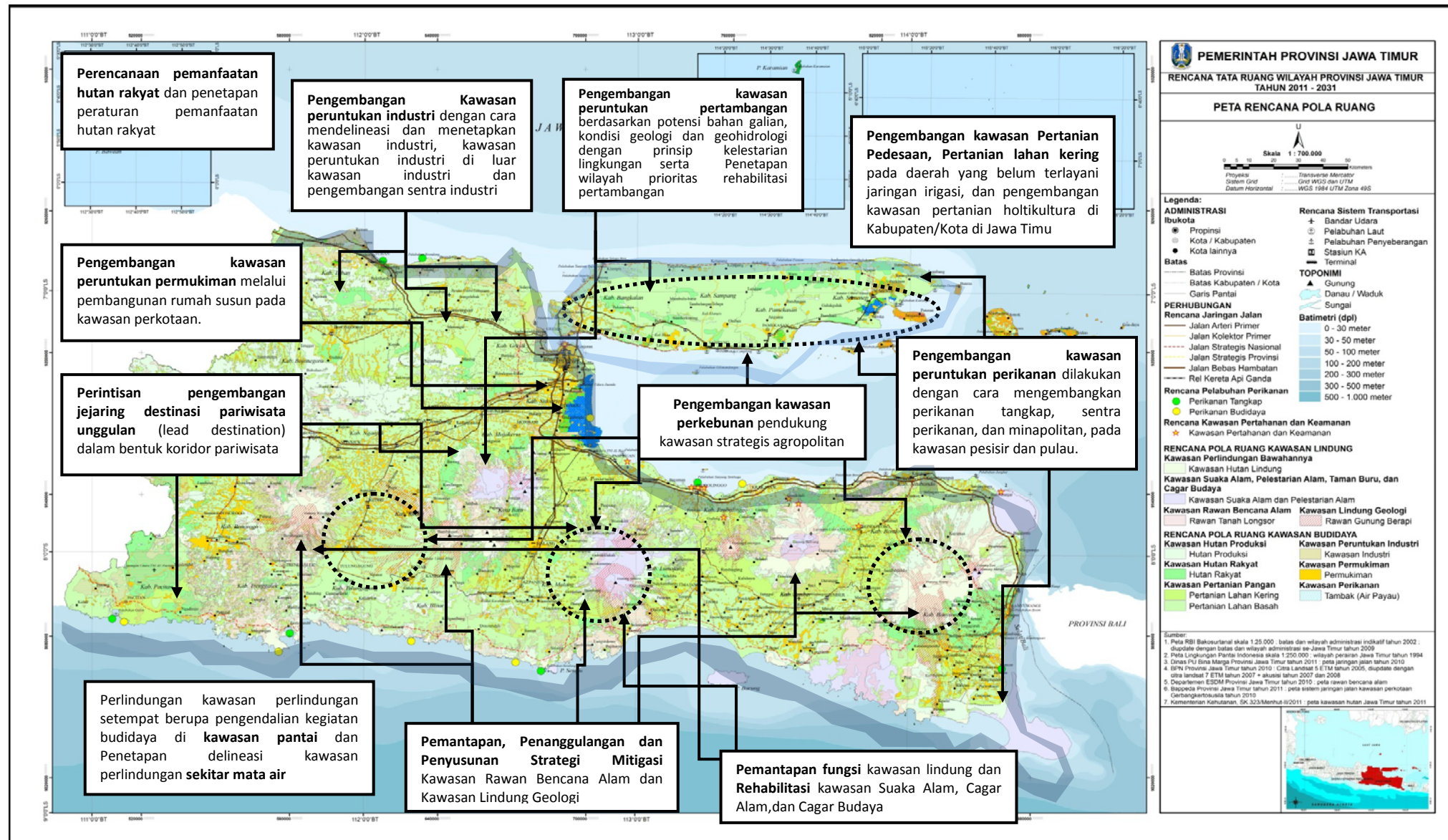
Gambar 5.2
Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial Pada Sistem Pusat Pelayanan dan Jaringan Prasarana Wilayah Utama Jawa Timur Tahun 2015



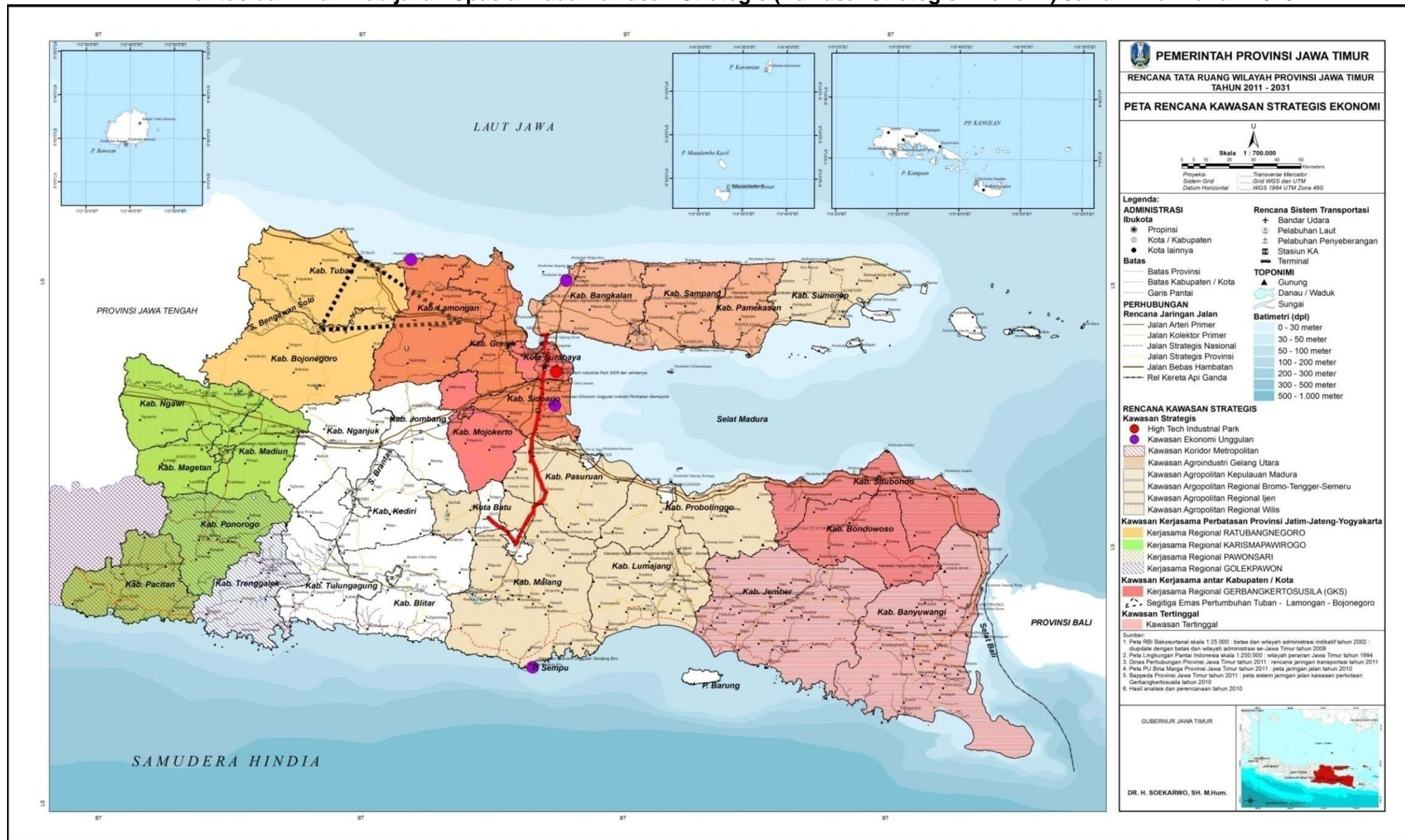
Gambar 5.3
Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial Pada Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya Jawa Timur Tahun 2015



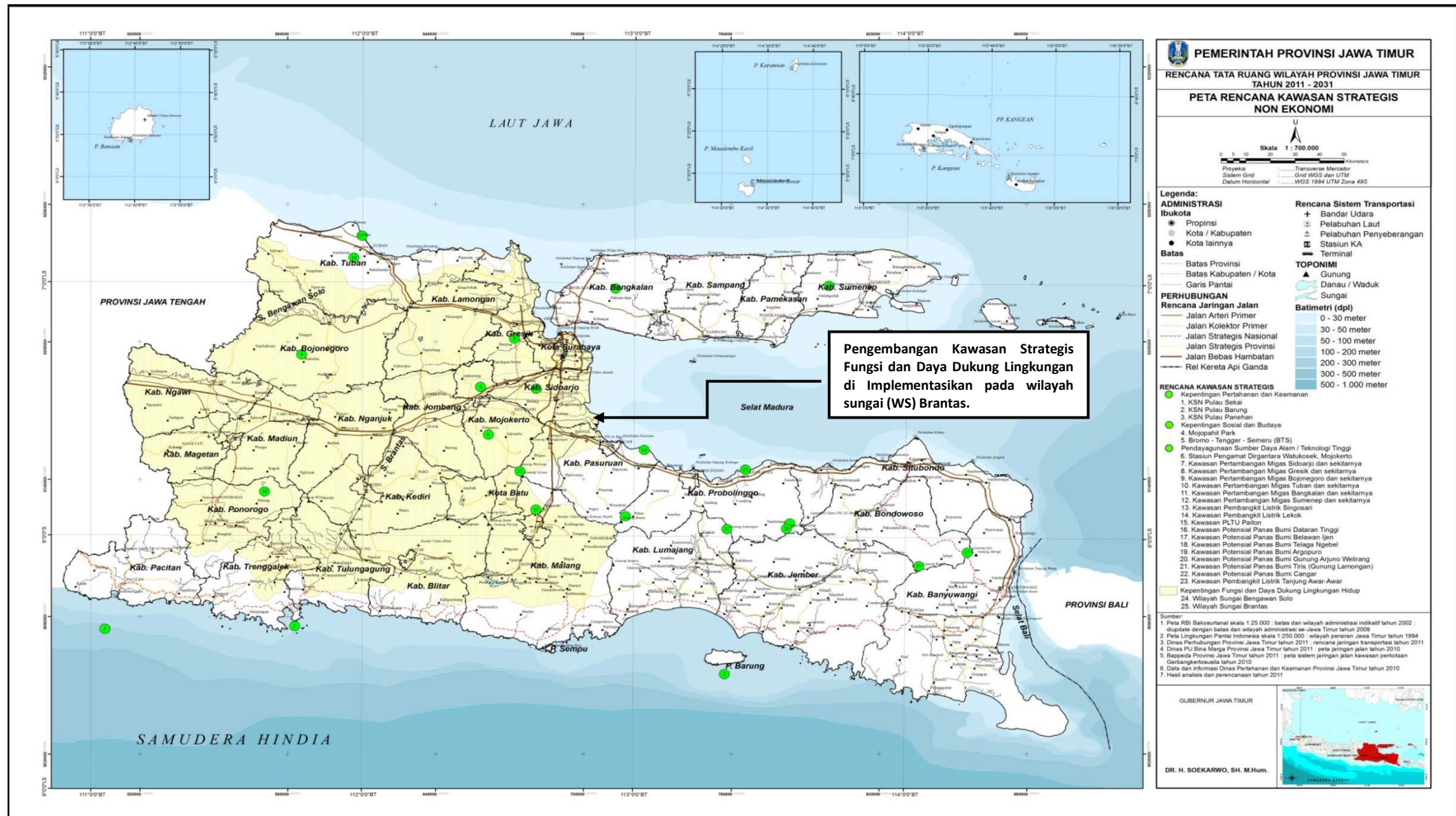
Gambar 5.4
Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial Pada Pola Ruang (Kawasan Lindung dan Budidaya) Jawa Timur Tahun 2015



Gambar 5.5
Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial Pada Kawasan Strategis (Kawasan Strategis Ekonomi) Jawa Timur Tahun 2015



Gambar 5.6
Prioritas dan Arah Kebijakan Spasial Pada Kawasan Strategis (Kawasan Strategis Non Ekonomi) Jawa Timur Tahun 2015



5.4 Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan

Matrik Rekapitulasi Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2015 merupakan penjabaran dari uraian substansi yang dijelaskan dalam sub bab 4.2.1 dan 4.2.2. Selengkapnya mengenai Matrik Rencana Program dan Kegiatan tersebut diuraikan pada buku II yang berisi Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2015 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari buku I.